

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

1. Penelitian oleh (Ahdi, 2022) dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Benda Kota Tangerang”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian yang diperoleh yaitu tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Benda dalam mengelola sampah termasuk dalam kategori tinggi dan memiliki rata-rata skor dari bobot nilai responden sebesar 70,49.
2. Penelitian oleh (Nasyith et al., 2020) yang berjudul “Analisis Ketersediaan Oksigen untuk Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017”. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan survey. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki ruang terbuka hijau eksisting sebesar 3.993 hektar, ruang terbuka hijau tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen bagi manusia, kendaraan bermotor, dan industri.
3. Penelitian oleh (Caesarina & Rahmani, 2019) dengan judul “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Kota Hijau di Perkotaan Martapura”. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kawasan perkotaan Martapura perlu penambahan ruang terbuka hijau dalam bentuk RTH aktif serta RTH pasif.
4. Penelitian oleh (Ngangi et al., 2018) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Kawasan Mapanget Sebagai Kota Baru”. Metode yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan hasil yang diperoleh yaitu pertumbuhan kawasan Mapanget baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun infrastruktur terdapat peningkatan yang signifikan tiap tahunnya.
5. Penelitian (Kuswati, 2017) yang berjudul “Peran Sektor Swasta (CSR) dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

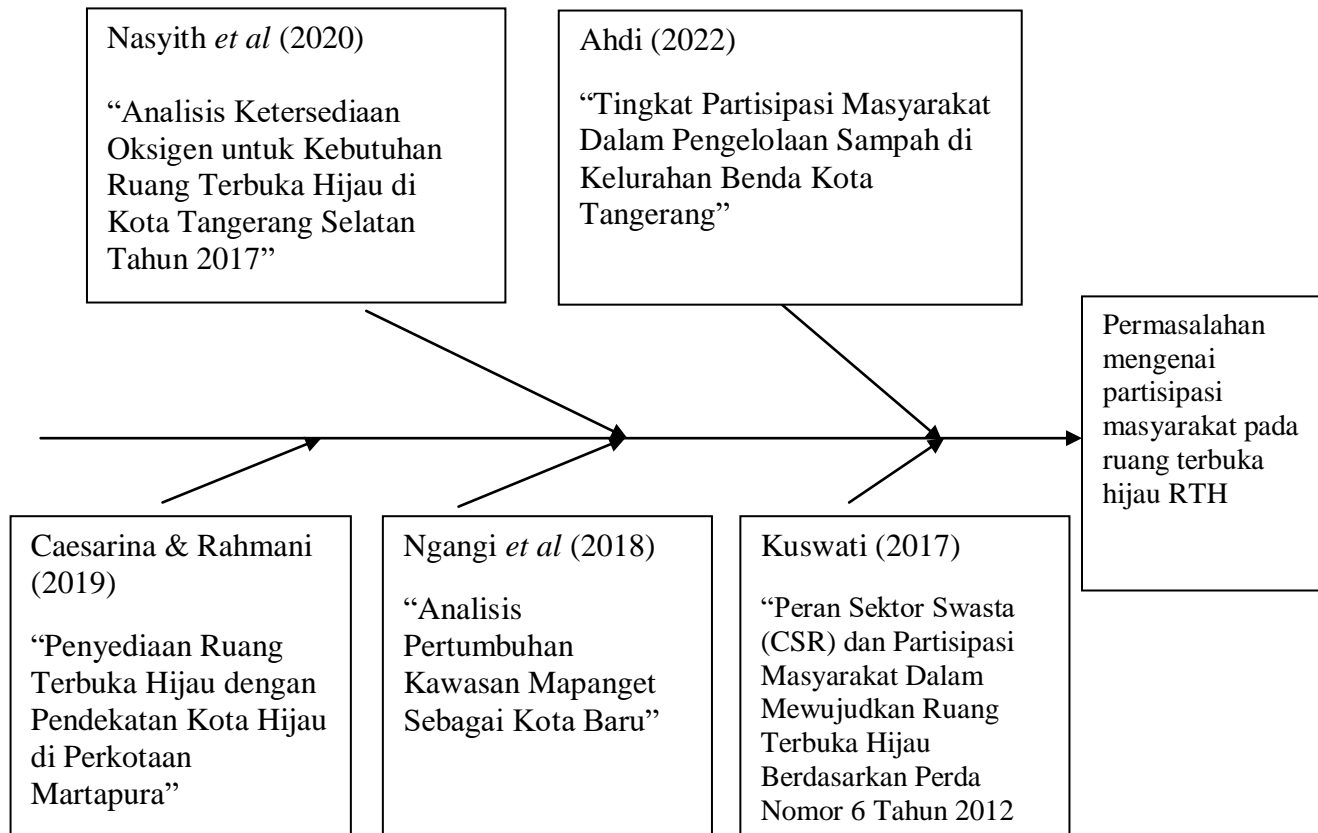
6. Wilayah Kota Tangerang (Studi Kasus: Kecamatan Tangerang)”. Metode yang digunakan adalah *mix method* dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari sektor swasta dengan presentase pengaruh sebesar 10% dan pengaruh yang cukup kuat dari partisipasi masyarakat dengan presentase pengaruh sebesar 20,8% dalam pembangunan RTH di Kecamatan Tangerang.

**Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka**

No	Nama Peneliti dan Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ahdi (2022) “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Benda Kota Tangerang”	Kuantitatif	Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Benda dalam mengelola sampah termasuk dalam kategori tinggi dan memiliki rata-rata skor dari bobot nilai responden sebesar 70,49	- Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu tingkat partisipasi masyarakat - Perbedaan lokasi penelitian, metode, dan teori yang digunakan
2	Nasyith <i>et al</i> (2020) “Analisis Ketersediaan Oksigen untuk Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017”	Kepustakaan dan Survey	Kota Tangerang Selatan memiliki ruang terbuka hijau eksisting sebesar 3.993 hektar, ruang terbuka hijau tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen bagi manusia, kendaraan bermotor, dan industry	- Persamaan hanya pada lokasi yaitu Tangerang Selatan - Perbedaan terletak pada objek penelitian, metode dan teori yang digunakan.

No	Nama Peneliti dan Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3	Caesarina & Rahmani (2019) “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Kota Hijau di Perkotaan Martapura”	Kuantitatif	Kawasan perkotaan Martapura perlu penambahan ruang terbuka hijau dalam bentuk rth aktif serta rth pasif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya yaitu sama-sama berkaitan dengan ruang terbuka hijau.</li> <li>- Perbedaan pada objek penelitian, metode, lokasi serta teori yang digunakan.</li> </ul>
4	Ngangi <i>et al</i> (2018) “Analisis Pertumbuhan Kawasan Mapanget Sebagai Kota Baru”	Kualitatif	Pertumbuhan kawasan Mapanget baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun infrastruktur terdapat peningkatan yang signifikan tiap tahunnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan pada metode penelitian</li> <li>- Perbedaan ada pada objek penelitian, lokasi, dan teori yang digunakan.</li> </ul>
5	Kuswati (2017) “Peran Sektor Swasta (CSR) dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (Studi Kasus: Kecamatan Tangerang)”.	<i>Mix Method</i>	Terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari sektor swasta dengan presentase pengaruh sebesar 10% dan pengaruh yang cukup kuat dari partisipasi masyarakat dengan presentase pengaruh sebesar 20,8% dalam pembangunan RTH di Kecamatan Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan ada pada objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat</li> <li>- Perbedaan dapat dilihat dari metode penelitian dan teori yang digunakan.</li> </ul>

Gambar 2.1 Fishbone Diagram



Berdasarkan tabel mengenai penelitian sebelumnya diatas terdapat persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Selain memiliki persamaan, peneliti menemukan beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Perbedaan yang pertama yaitu metode penelitian yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif namun ada juga yang menggunakan metode kualitatif. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah tangga partisipasi Muluk (2007) dan teori partisipasi Keith Devis sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori atau tangga partisipasi yang dikembangkan oleh Arnstein (1969). Selain itu perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian, pada penelitian ini melakukan penelitian terhadap Taman Kota 2 yang di Kota Tangerang Selatan.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Administrasi Publik

#### 1. Definisi

Administrasi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang sifatnya sistematis serta terencana yang dilaksanakan oleh beberapa orang dengan maksud mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional (Pasolong, 2019). White dalam (Adnan & Hamim, 2013) memberikan definisi dari administrasi yaitu “Administrasi adalah proses yang umum untuk semua usaha, publik swasta, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Itu adalah proses di tempat kerja, Bank, Sekolah, Universitas, atau pemerintah kota”.

Sedangkan Marliani (2018) memberikan penjelasan bahwa administrasi apabila ditinjau dari etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu “*administration*” yang berarti *to manage* (mengelola). Artinya, administrasi merupakan bagian atau divisi yang didalamnya terdapat lebih dari dua orang yang bertugas sebagai pengurus berbagai hal yang berhubungan dengan melakukan pencatatan, aktivitas penggandaan, dan lainnya untuk berkontribusi dalam pencapaian target organisasi atau negara.

Berdasarkan uraian diatas maka administrasi merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam keberlangsungan sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah negara. Setiap organisasi bahkan negara membutuhkan administrasi sebagai salah satu bidang yang harus ada untuk mengurus berbagai hal yang sifatnya *administrative*.

Jefkins dalam Revida et al (2020) berpendapat bahwa publik adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa kelompok dalam masyarakat yang berinteraksi satu sama lain dengan suatu organisasi secara internal maupun eksternal. Artinya publik adalah pihak yang memiliki pengaruh dan sangat diperhatikan opininya oleh organisasi, lembaga, hingga negara. Syafi'ie dalam Pasolong (2019) mengatakan bahwa definisi dari publik adalah beberapa kelompok orang yang

memiliki kesamaan dalam pemikiran, sikap, serta harapan berdasarkan norma yang berlaku diantara mereka.

Sellang, K. (2016) Administrasi publik adalah bagian, bidang, atau unsur yang membantu negara dalam mengatur masyarakat serta material dengan maksud untuk mencapai tujuan pemerintah. Chandler dan Plano dalam Revida et al (2020) mengatakan bahwa administrasi publik yaitu proses dalam aktivitas merumuskan, menerapkan serta mengelola keputusan dalam kebijakan publik oleh sumber daya publik.

Henry dalam Rahman (2017) memberikan penjelasan mengenai definisi dari administrasi publik yaitu kolaborasi antara teori serta praktik yang memiliki tujuan untuk mempromosikan tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat, selain itu juga agar meningkatkan responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan uraian diatas maka administrasi publik adalah serangkaian aktivitas dari sebuah organisasi maupun lembaga yang ada di suatu negara yang membantu mengurus segala urusan yang berkaitan dengan administrasi negara dan masyarakat.

## **2. Peran Administrasi Publik**

Administrasi publik memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara. Gordon dalam (Muhammad, 2019) menjelaskan bahwa peranan penting yang dimiliki administrasi publik dalam sebuah negara lebih besar serta lebih mengarah kepada aktivitas perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan Cleveland dalam (Pasolong, 2019) mengungkapkan bahwa administrasi publik sangat berperan penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta menciptakan demokrasi. Menurutnya, keberadaan administrasi publik ditujukan sebagai pemberian pelayanan publik yang manfaatnya bisa digunakan masyarakat.

Gray dalam (Pasolong, 2019) juga memberikan pendapatnya mengenai peranan administrasi publik yaitu sebagai berikut:

- a. Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan
- b. Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia
- c. Administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

### **3. Ruang Lingkup Administrasi Publik**

Dimmock dalam (Pasolong, 2019) memberikan penjelasan bahwa administrasi publik terdiri dari empat komponen yaitu sebagai berikut:

- a. Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana.
- b. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya: struktur administrasi dari segi formalnya.
- c. Bagaimana para administrator mewujudkan kerja sama (*teamwork*). Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pimpinan, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moril, hubungan masyarakat dan sebagainya.

- d. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab: baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif, dan berbagai badan lainnya.

Berdasarkan pendapat (Sellang, 2016) bahwa ruang lingkup administrasi publik terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Kebijakan publik

Kebijakan publik didefinisikan sebagai ketetapan pemerintah terhadap suatu hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan berkaitan dengan hal-hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Birokrasi publik

Birokrasi publik merupakan keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan

- c. Manajemen publik

Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

- d. Kepemimpinan

Pemimpin diartikan sebagai seseorang yang bertanggungjawab sebagai pendengar, pengambil keputusan, atau yang bisa disebut dengan pemimpin. Sedangkan kepemimpinan yaitu sifat yang mencerminkan bagaimana seorang pemimpin yang seharusnya. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruhnya kepada orang lain untuk melaksanakan apa yang diarahkan (Badu & Djafri, 2017).



e. Pelayanan publik

Pelayanan publik sangat diperlukan untuk memenuhi segala bentuk kepentingan dan keperluan masyarakat berkaitan dengan kenegaraan. (Bahar et al, 2020). Pelayanan publik didefinisikan sebagai pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang berkepentingan pada organisasi tersebut untuk memenuhi keperluannya berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku (Bosko & Mael, 2020).

f. Administrasi kepegawaian

Arikunto, Suharsimi (2013). Pada dasarnya Administrasi Kepegawaian Negara merupakan salah satu cabang dari pada administrasi negara yang membahas secara khusus mengenai persoalan pegawai negara.

g. Kinerja

Arikunto, Suharsimi (2013). Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

h. Etika administrasi publik

Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan kode etik atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik.

## 2.2.2 Partisipasi

### 1. Definisi

Menurut (Arnstein, 1969) partisipasi masyarakat dianggap sebagai kekuatan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan mendeskripsikan adanya pembagian kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Peran aktif dari masyarakat secara langsung merupakan prinsip dari partisipasi dalam proses pembangunan. Suhendi dalam (Novian & Machdum, 2020) mengungkapkan bahwa suatu pembangunan akan terhambat prosesnya atau tidak maksimal hasil akhirnya apabila

masyarakat tidak ikut serta dan cenderung pasif dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pendapat Suryosubroto dalam (Hardani 2020). Partisipasi tidak hanya sebatas keterlibatan secara fisik, mental dan emosi juga turut ikut serta dalam berkontribusi untuk mendukung berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Sedangkan (Bahua, 2018) memberikan penjelasan bahwa partisipasi sama artinya dengan ikut berperan, ikut terlibat, ataupun proses yang dijalankan oleh beberapa anggota masyarakat dalam analisis, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Sedangkan Adisasmita dalam (Fauziah & Nasdian, 2021) memberikan definisi mengenai partisipasi yaitu sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, artinya adalah kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan suatu pembangunan.

Partisipasi merupakan peran serta atau keikutsertaan seseorang baik berupa tenaga, pemikiran maupun materil untuk kepentingan pembangunan dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan bentuk peran serta dalam mewujudkan pembangunan, dalam melaksanakan perencanaan atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan adanya partisipasi atau keikutsertaan dari masyarakat agar adanya hubungan timbal balik sehingga masyarakat berperan aktif (Mulyanie & Husna, 2019).

Suhada, 2017 Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik mengenai definisi partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan

suatu pembangunan sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

## 2. Kriteria Partisipasi

Partisipasi sering diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kriteria yang mencerminkan adanya partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut (Santoso & Moenek, 2018).

- a. Adanya keterlibatan orang-orang yang sukarela dan demokratis dalam sumbangsuhnya terhadap usaha /program pembangunan;
- b. Adanya penerimaan manfaat secara merata di kalangan masyarakat; dan;
- c. Pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi.

### Kriteria Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Kota 2

Penentuan kriteria partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Taman Kota 2 ini didapatkan dari hasil komparasi hasil analisa sebelumnya, studi literatur dan tinjauan kebijakan, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Kriteria partisipasi masyarakat pada Tipologi Perubahan Sedang
  - a) Adanya pertemuan warga secara rutin untuk membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi, terutama terkait dengan kondisinya sebagai kawasan Taman Kota, seperti teknis (material/biaya) perawatan bangunan, menentukan bangunan mana saja yang perlu perlakuan khusus, membahas alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kawasan Taman Kota 2, dan sebagainya.
  - b) Adanya pengurus harian yang anggotanya diambil dari warga setempat dalam melakukan penyuluhan mengenai kawasan Taman Kota 2 dengan didampingi oleh aparat pemerintahan.
- 2) Kriteria partisipasi masyarakat pada Tipologi Perubahan Kecil

- a) Adanya penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemeliharaan/perawatan infrastruktur dan Tanaman sebagai identitas kawasan yang rutin dilakukan oleh pemerintah dengan didampingi masyarakat sekitar.
  - b) Beberapa warga yang berpengaruh atau tokoh masyarakat masuk sebagai salah satu anggota penyusun kebijakan.
- 3) Kriteria partisipasi masyarakat pada Tipologi Tidak Ada Perubahan
- a) Adanya kegiatan kumpul warga aktif sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian menjaga lingkungan sebagai kawasan bersejarah
  - b) Beberapa anggota masyarakat masuk sebagai anggota penyusun kebijakan dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pelestarian yang akan dilakukan.

### 3. Unsur Penting Partisipasi

Davis mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan baik secara fisik, pemikiran, dan emosi atau perasaan pada situasi kelompok. Beberapa unsur penting yang harus diperhatikan menurut Davis dalam (Herman, 2019) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/ peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah;
- b. Ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya;
- c. Unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota berarti ada: “(*sense of belonging*)”

#### **4. Jenis Partisipasi**

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Gaventa dan Valderama dalam (Bahua, 2018), partisipasi memiliki 3 konsep atau jenis yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik mengarah pada dunia perpolitikan dimana wakil-wakil rakyat diberi pengaruh untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan ikut serta secara aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah keikutsertaan individu yang menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan untuk ikut andil dan mengambil bagian dalam kegiatan pemerintahan.

##### **b. Partisipasi Sosial**

Partisipasi ini mengarah pada peran serta masyarakat yang bukan bagian dari pelaksanaan pembangunan untuk ikut dalam kegiatan diskusi perencanaan pembangunan, baik dalam proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Inti dari proses partisipasi sosial adalah implikasi komunitas dalam dunia kebijakan publik diarahkan sebagai pembelajaran dan mobilisasi sosial.

##### **c. Partisipasi Warga**

Arifin, S., & Arifin, H. (2005). Partisipasi warga menitikberatkan pada keikutsertaan langsung warga dalam penetapan keputusan pada dewan dan proses pemerintahan. Partisipasi warga memang lebih mengarah pada rencana penetapan kebijakan umum oleh warga dibandingkan menjadikan kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

#### **5. Bentuk Partisipasi**

Menurut Ndraha dalam (Fauziah & Nasdian, 2021) terdapat beberapa bentuk dari partisipasi yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai suatu titik awal dalam perubahan sosial;
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan dengan syarat ataupun dalam arti menolaknya;
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; dan
- d. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.

## 6. Tingkat Partisipasi

Arnstein (1969) membagi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Jenjang tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tangga Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkat Pembagian Kekuasaan
Manipulasi ( <i>Manipulation</i> )	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
Terapi ( <i>therapy</i> )	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
Pemberitahuan ( <i>Informing</i> )	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	Tokenism/sekedar justifikasi agar mengiyakan
Konsultasi ( <i>Consultation</i> )	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
Penentraman ( <i>Placation</i> )	Saran Masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
Kemitraan ( <i>Partnership</i> )	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Pendelegasian Kekuasaan ( <i>Delegated Power</i> )	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
Kontrol Masyarakat ( <i>Citizen Control</i> )	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Sumber: Arnstein (1969)

Berdasarkan tabel diatas, Arnstein (1969) memberikan penjelasan mengenai 8 tingkatan atau anak tangga partisipasi sebagai berikut:

a. Manipulasi

Manipulasi merupakan salah satu bentuk partisipasi yang berada di tingkat paling rendah dan menggambarkan ketidakterlibatan yang disengaja yang bertujuan menggantikan partisipasi yang sebenarnya. Manipulasi terjadi ketika institusi, pejabat, atau administrator publik menggunakan taktik yang menyesatkan untuk membuat warga negara percaya bahwa mereka memiliki kekuasaan dalam suatu proses yang sebenarnya telah ditentukan sebelumnya. Praktik ini dilakukan dengan maksud untuk mengendalikan persepsi publik dan memperoleh keuntungan atau kekuasaan yang lebih besar tanpa melibatkan partisipasi yang adil atau transparan dari masyarakat.

b. Terapi

Manipulasi dalam bentuk partisipasi terapi terjadi ketika pejabat publik dan administrator mengasumsikan bahwa ketidakberdayaan secara otomatis berarti seseorang mengalami gangguan mental. Mereka kemudian menciptakan program partisipatif palsu yang bertujuan meyakinkan warga bahwa merekalah penyebab masalah, padahal sebenarnya masalah tersebut berasal dari kebijakan dan institusi yang sudah mapan. Dengan melakukan hal ini, mereka berupaya mengalihkan tanggung jawab dari diri mereka sendiri dan menemukannya pada individu yang seharusnya mendapatkan dukungan dan perubahan struktural yang sesungguhnya. Tindakan ini berpotensi menciptakan stigma dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menjaga status quo yang menguntungkan pihak yang berkuasa, sementara warga negara terus menderita akibat kebijakan yang kurang memadai.

c. Pemberitahuan

Memberikan pemberitahuan kepada warga negara mengenai hak, tanggung jawab, dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mencapai partisipasi warga negara yang sah. Namun, penting untuk diingat bahwa saluran informasi yang digunakan dalam proses ini seringkali hanya mengalir satu arah, tanpa adanya interaksi timbal balik yang substansial atau realisasi yang konkret. Dalam konteks ini, pemberitahuan yang diberikan kepada warga negara hanya berupa penyampaian informasi dari pihak yang berwenang kepada masyarakat. Meskipun informasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak-hak mereka, tanggung jawab yang dimiliki, dan pilihan yang tersedia, namun hal ini belum cukup untuk mencapai partisipasi yang sepenuhnya bermakna.

Untuk mencapai partisipasi yang sejati, penting bagi pihak berwenang dan institusi untuk memastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka, inklusif, dan berkesinambungan antara mereka dan warga negara. Ini akan melibatkan proses dialog, diskusi, dan keterlibatan aktif dari warga negara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, realisasi dari hak, tanggung jawab, dan pilihan warga negara juga harus didorong melalui langkah-langkah nyata dan implementasi kebijakan yang mendukung partisipasi yang aktif. Pemberitahuan kepada warga negara hanya merupakan langkah awal yang penting, tetapi untuk mencapai partisipasi warga negara yang sejati, diperlukan saluran komunikasi yang dua arah, serta upaya konkret untuk mendorong realisasi dari hak, tanggung jawab, dan pilihan warga negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.

d. Konsultasi

Masyarakat mempunyai peluang meskipun masyarakat juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai



masukannya bagi pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan, namun keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan tidaklah signifikan.

e. Penentruman

Partisipasi sebagai penentruman terjadi ketika warga negara diberikan sejumlah pengaruh yang terbatas dalam suatu proses, namun partisipasi mereka sebagian besar atau sepenuhnya bersifat simbolis. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat hanya berfungsi sebagai tindakan demonstrasi atau sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam proses tersebut.

f. Kemitraan

Penyelenggara pemerintah daerah mempunyai peluang untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat misalnya LPMK, RW, dan RT, untuk menjalankan kebijakannya.

g. Pendelegasian Kekuasaan

Dalam kategori partisipasi kuat terdapat anak tangga delegasi yang mempunyai ciri-ciri adanya penyerahan sebagian porsi kewenangan kepada pihak organisasi kemasyarakatan tertentu oleh pemerintah daerah, pendelegasian ini bersifat otonom akan tetapi kendali utama tetap berada di pemerintahan daerah

h. Kontrol Masyarakat

Partisipasi sebagai kontrol warga terjadi, dalam kata-kata Arnstein, ketika “peserta atau penduduk dapat memerintah suatu program atau lembaga, bertanggung jawab penuh atas kebijakan dan aspek manajerial, serta mampu negosiasikan kondisi di mana 'orang luar' dapat mengubahnya”. Dalam situasi kontrol warga negara, untuk misalnya, pendanaan publik akan mengalir langsung ke organisasi masyarakat, dan organisasi itu akan melakukannya memiliki kontrol penuh atas bagaimana dana itu dialokasikan.

Berdasarkan pendapat (Fauziah,2021) bahwa ruang lingkup partisipasi terdiri dari beberapa hal yaitu:

1. Akses informasi
2. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
3. Pelibatan dalam perencanaan dan perancangan
4. Implementasi dan monitoring
5. Evaluasi dan umpan balik

### **2.2.3 Masyarakat**

#### **1. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan, untuk menuju tujuan yang sama. Manusia hidup berbudaya dan bermasyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki karakteristik dengan berelasi atau berhubungan diantara individu pada kultur atau institusi tertentu (Aswasulasikin, 2017).

Masyarakat menurut (Pasolong, 2019) adalah sekelompok orang yang terdiri dari berbagai jenis suku, ras, agama, dan budaya yang hidup secara berdampingan membentuk kelompok tertentu dan saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat merupakan berbagai kelompok orang yang tinggal dalam satu wilayah dengan peraturan, nilai, serta norma yang sama.

Pengertian yang dipaparkan Arifin dalam (Aswasulasikin, 2017) mengandung makna bahwa masyarakat kumpulan beberapa manusia yang berada dalam suatu tempat tinggal tertentu, yang berkarakter dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akan membentuk satu kultur dalam suatu daerah.

Emzir. (2016).,Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka masyarakat memiliki definisi yaitu orang-orang dari berbagai suku, ras, bahkan agama yang hidup secara bersama-sama dan berdampingan memberntuk suatu kelompok menempati sebuah wilayah dengan pola

perilaku, norma, dan nilai yang sama sehingga membentuk suatu kultur atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Henry dalam (Novian & Machdum, 2020) mengungkapkan bahwa masyarakat sangat diharapkan partisipasinya dalam pembangunan daerah karena diperlukan kritik dan masukan dari pihak masyarakat sebagai pengguna layanan serta fasilitas publik. Masyarakat juga diharapkan agar mampu menganalisis perbaikan atas bidang tertentu yang memang harus diperbaiki, termasuk dalam pengelolaan taman kota 2 Tangerang Selatan.

## **2. Unsur dan Ciri Masyarakat**

Menurut Durkheim dalam (Kaluwur et al, 2017) masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Terdapat beberapa unsur masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- b. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- c. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Sedangkan ciri-ciri masyarakat berdasarkan pendapat Soekanto dalam (Kaluwur et al, 2017) adalah sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang
- b. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

## 2.2.4 Ruang Terbuka Hijau

### 1. Definisi

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Amin, 2018). Partisipasi masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau saat ini sangat penting karena sebagai wujud pendekatan *bottom up* dan *top down*, yang dilakukan dalam pembangunan suatu wilayah khususnya Ruang Terbuka Hijau Publik (Mulyanie & Husna, 2019).

Taman kota merupakan salah satu jenis dari ruang publik hijau publik. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH Publik) dimaknai sebagai ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah setempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dalam pedoman tersebut juga diamanatkan bahwa proporsi RTH publik di wilayah perkotaan minimal 20% dari total RTH.

Menurut Susiloarifin & Nurhayati dalam (Salshabila & Sukmawati, 2021), taman kota merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga memiliki nilai keindahan, keamanan, dan keamanan bagi pemilikinya maupun penggunaannya. Mardikanto, Totok., & Soebiato, Poerwoko. (2015) Merujuk pada hal tersebut, maka taman kota sebagai RTH publik memiliki peran penting bagi sebuah kota karena merupakan ruang milik bersama yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, baik bersantai, berinteraksi sosial, maupun untuk fungsi ekologis. Menurut Harjanti & Anggraini (2020) bahwa RTH publik maupun privat bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat dan lingkungan karena menyangkut fungsi ekologi, estetika, dan ekonomi.

## 2. Jenis RTH

Jenis ruang terbuka hijau menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan terdiri dari:

### a. Taman kota

Taman kota adalah taman yang dibangun ditengah kota untuk memperindah kota dan dapat dinikmati penduduk perkotaan disekitarnya

Gambar 2.2 Lokasi Taman Kota Tangerang Selatan



Sumber : Google

### b. Taman wisata alam

taman wisata alam yaitu hutan wisata yang mempunyai berbagai keindahan alam, baik keindahan flora dan fauna maupun keindahan alam itu sendiri yang mana memiliki keunikan corak untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Gambar 2.3 Taman Wisata Alam



Sumber : Google

c. Taman rekreasi

Taman rekreasi adalah Taman yang dibuat sebagai hiburan/tempat rekreasi/tempat liburan.

Gambar 2.4 Taman Rekreasi



Sumber : Google

d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman

Yaitu salah satu taman yang berisi tanaman-tanaman yang dirawat.

Gambar 2.5 Taman Lingkungan Perumahan



Sumber : lehautduper.com

e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial

Gambar 2.6 Taman Lingkungan Perkantoran



Sumber : Google

f. Taman hutan raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Gambar 2.7 Taman Hutan Raya



Sumber : Google

g. Hutan kota

Hutan kota merupakan salah satu komponen ruang terbuka hijau. Keberadaan hutan kota sangat berfungsi sebagai sistem hidroorologi, menciptakan iklim mikro, menjaga keseimbangan oksigen (O<sub>2</sub>) dan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), mengurangi polutan, dan meredam kebisingan.

Gambar 2.8 Taman Hutan Kota



Sumber : Google

h. Hutan lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yg digunakan sebagai sistema penyangga dan pengatur untuk mencegah terjadinya banjir, erosi, mengatur aliran air.

Gambar 2.9 Hutan Lindung



Sumber : Google

i. Bentang alam (seperti gunung, bukit, lereng dan lembah)

Bentang Alam adalah terjemahan dari LANDFORM yang diartikan sebagai suatu unit geomorfologis yang pengelompokannya berdasar pada sejumlah karakteristik seperti kelandaian, elevasi, stratifikasi, orientasi, paparan batuan serta jenis tanah.



Gambar 2.10 Bentang Alam



Sumber : Google

j. Cagar alam

Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam.

Gambar 2.11 Cagar alam



Sumber : Google

k. Kebun raya

Kebun raya atau kebun binatang yaitu adalah suatu perlindungan lokasi yang dijadikan sebagai tempat obyek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan atau fauna yang masih hidup.

Gambar 2.12 Kebun Raya



Sumber : Google

## 1. Kebun binatang

kebun binatang yaitu adalah suatu perlindungan lokasi yang dijadikan sebagai tempat obyek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan atau fauna yang masih hidup.

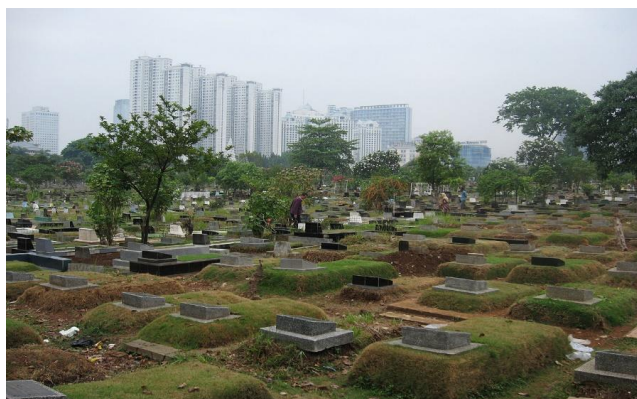
Gambar 2.13 Kebun Binatang



Sumber : Google

## m. Pemakaman umum

Gambar 2.14 Pemakaman Umum



n. Lapangan olahraga

Gambar 2.15 Lapangan Umum



Sumber : Google

o. Lapangan upacara

Gambar 2.16 Lapangan Upacara



Sumber : Google

### 3. Fungsi RTH

Dalam permendagri No. 1 tahun 2007 disebutkan fungsian manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yaitu: Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan adalah: Pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan; Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; Pengendali tata air; Sarana estetika kota.

Masyarakat sebagai objek maupun subjek yang ikut berperan dalam memberikan masukan bagi daerahnya sangat diharapkan karena pembangunan kawasan perkotaan yang didalamnya terdapat masyarakat

yang melakukan berbagai aktivitas dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan keinginan bersama. Mewujudkan kota yang sehat, nyaman, dan asri, perlu adanya pembangunan dari segala bidang sehingga semua pihak ikut merasakan keuntungannya dengan adanya Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana rekreasi, menambah kesejukan pusat kota, meningkatkan estetika dan prestise kawasan perkotaan karena adanya Ruang Terbuka Hijau yang tertata rapi dan asri (Mulyanie & Husna, 2019).

#### **4. Manfaat RTH**

Sementara manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Taman Kota 2 dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencerminkan identitas Kota Tangerang Selatan;
- b. Taman Kota 2 bermanfaat untuk dijadikan sebagai sarana penelitian;
- c. Taman Kota 2 dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. Taman Kota 2 dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. Taman Kota 2 dapat menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi Kota Tangerang Selatan.

Pengelolaan taman melibatkan serangkaian kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan taman dengan cara yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ruang lingkup pengelolaan taman dapat mencakup berbagai aspek yang meliputi:

1. Perencanaan: Merencanakan penggunaan lahan, desain taman, dan pengembangan fasilitas yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan taman tersebut. Ini meliputi penentuan zona-zona dalam taman, pengaturan aksesibilitas, serta penempatan fasilitas seperti area bermain, taman air, area piknik, dan tempat rekreasi lainnya.

2. **Pemeliharaan:** Melakukan kegiatan pemeliharaan rutin seperti pemotongan rumput, pemangkasan pohon dan tanaman, pemeliharaan fasilitas, perbaikan infrastruktur, dan pengelolaan sampah. Tujuan pemeliharaan adalah untuk menjaga keindahan dan kebersihan taman serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung.
3. **Konservasi alam:** Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, ekosistem alami, dan sumber daya alam yang ada di dalam taman. Ini melibatkan pengelolaan flora dan fauna, perlindungan terhadap spesies langka atau terancam punah, dan menjaga keseimbangan ekologi di dalam taman.
4. **Pendidikan dan kesadaran masyarakat:** Menyediakan informasi dan program pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya taman, lingkungan alam, dan kegiatan yang dapat dilakukan di dalamnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga taman dan lingkungan sekitarnya.
5. **Pengaturan penggunaan:** Mengatur penggunaan taman dengan mengatur waktu, jenis kegiatan, dan aturan-aturan tertentu untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan taman. Hal ini melibatkan pengaturan izin penggunaan komersial, kegiatan olahraga, acara-acara khusus, dan pemantauan pengunjung untuk memastikan penggunaan taman yang bertanggung jawab.
6. **Pengembangan fasilitas:** Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur taman untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pengalaman pengunjung. Ini meliputi pembangunan jalur pejalan kaki, area bermain, toilet umum, tempat duduk, tanda dan papan informasi, serta fasilitas parkir yang memadai.
7. **Partisipasi masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan taman. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, kelompok

kerja, atau program sukarelawan yang melibatkan masyarakat setempat dalam menjaga dan mengembangkan taman.

Perjelasan di atas memberikan gambaran umum tentang ruang lingkup pengelolaan taman, tetapi dapat bervariasi tergantung pada ukuran, jenis, dan tujuan dari taman yang dikelola.

### **2.3 Tentang Taman Kota 2**

Taman Kota 2 BSD mengadopsi konsep ruang terbuka sungai Cheonggyecheon, Korea Selatan. Tampilan modern dan estetik ala taman-taman di Kota Seoul seolah menyambut kedatangan pengunjung.

Taman kota 2 BSD Tangerang merupakan bantaran sungai yang direvitalisasi oleh pemerintah kota. Dengan tujuan memberikan ruang terbuka hijau dan bersih, BSD 2 Tangerang jadi spot liburan santai terfavorit. Taman kota 2 BSD Serpong ini baru selesai digarap tahun 2021. Meskipun tergolong baru, fasilitas tempat wisata di Tangerang terbaru ini patut diacungi jempol.

Gambar 2.17 Taman Kota



Sumber : Google

### **Harga Tiket Masuk di Taman Kota 2 BSD**

Untuk warga sekitar Tangerang maupun kawasan Jabodetabek, menghabiskan akhir pekan di Taman Kota 2 BSD tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Pemerintah kota memberikan Taman Kota Tangerang BSD sebagai ruang terbuka untuk warga *refreshing*. Biaya tiket masuk hanya berlaku apabila pengunjung ingin mencoba wahana lain seperti ATV atau berkendara kuda. Selain gratis, taman kota 2 Serpong Tangerang juga buka dari pagi hingga menjelang petang. Ini memudahkan warga yang ingin berkunjung kesana. Bahkan ketika jadwal mereka padat, waktu luang selepas bekerja mereka dapat mampir ke bumi serpong damai 2. Pengunjung biasa memadati Taman Kota 2 BSD ketika hari libur nasional atau weekend. Selain beraktivitas dengan keluarga, mereka dapat berolahraga atau berburu spot foto instagenic. Desain taman kota yang identik dengan riverpark di Seoul membuat kawasan ini kerap dijadikan tempat *prewedding*.

### **Alamat dan Rute Lokasi**

Alamat taman kota 2 Serpong Tangerang berada di kawasan strategis. Letak yang mudah diakses oleh kendaraan umum maupun pribadi. Taman Kota Tangerang BSD beralamat di Jl. Letnan Sutopo, Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Untuk menuju ke tempat wisata di Banten terpopuler ini, pengunjung harus masuk lewat pusat tanaman hias BSD. Tepatnya ada di Jalan Raya Victor, Setu, Serpong, Tangerang Selatan.

### **Jam Buka Taman Kota 2 BSD**

Taman Kota Tangerang BSD dibuka setiap hari, jam operasionalnya sama dengan Taman Kota 1. Kedatangan pengunjung umumnya membludak saat weekend atau cuti nasional tiba. Tiap hari, Taman Kota BSD 2 buka mulai pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Berkunjunglah bersama keluarga atau teman dekat agar aktivitas liburan

Anda makin menyenangkan. Area terbuka disini sangat luas sehingga nyaman untuk bersantai. Pastikan datang ketika cuaca sedang cerah dengan begitu aktivitas liburan di outdoor ini tidak terhambat. Hari yang cerah mendukung untuk kegiatan eksplor Anda, seperti menjajal ATV atau berkuda.

### **Fasilitas**

Berbicara soal fasilitas, Taman Bumi Serpong Damai 2 patut diacungi jempol. Meskipun tergolong baru, pihak pengelola memberikan sarana yang baik dalam menunjang aktivitas masyarakat. Fasilitas yang ada di Taman Kota Tangerang BSD yaitu: Toilet umum, Kios, Penjaja makanan, mushola, rea parkir. Adapun sarana yang disediakan diantaranya: Pedestrian, Jogging track, Skatepark, Area bermain anak, Bangu taman, Pendopo.

Taman Kota Tangerang BSD mempunyai rekomendasi wahana seru yang bisa dijajal dengan biaya tambahan. Mulai dari kereta mini, odong-odong, ATV, hingga kuda tunggang dan delman. Aktivitas seru tersebut sudah bisa dinikmati dengan merogoh kocek mulai dari Rp 15.000.

### **Spot Wisata di Taman Kota 2 BSD**

Spot wisata di Taman Kota 2 BSD tidak hanya cocok untuk melakukan olahraga atau nongkrong asik saja. Pengunjung akan dimanjakan dengan sejumlah zona lain yang tak kalah menarik.



Gambar 2.18 Spot Foto Taman Kota 2



Sumber : Google

### **Jeletreng River Park**

Jeletreng merupakan bukti menakjubkan ruang publik yang didesain dengan konsep kekinian. Tak hanya menarik, hal-hal ikonik yang sebelumnya tidak dijumpai di taman kota, ada disini. Terdapat promenade unik yang menghiasi bantaran sepanjang 100 meter tersebut. Untuk merasakan Cheonggyecheon, pengunjung dapat menuruni anak tangga. Di promenade, pagar pembatasnya sangat kokoh dengan permukaan yang dicat menarik. Tak jauh dari pagar pembatas, ada bangku yang dapat digunakan untuk duduk santai. Tak cukup sampai disitu, graffiti dengan motif lucu di sepanjang sungai pun jadi spot foto *instagenic*. Area setapak di taman kota Tangerang BSD ramah disabilitas pengguna kursi roda. Begitu pula dengan pengguna sepeda, skateboard, dan sepatu roda.

### **Kawasan Hutan**

Taman Kota 2 BSD Tangerang punya zona hutan yang kerap dipakai sebagai area *jogging*. Jalur untuk olahraga dibuat mengelilingi taman hingga sampai di Jeletreng River Park. Kawasan hutan ini ditumbuhi oleh pepohonan tinggi dan rapat. Sinar matahari hanya masuk melalui celah pohon sehingga tidak begitu panas. Di sekitarnya juga ada area terbuka yang cocok untuk bersantai. Termasuk jika pengunjung ingin piknik atau memakai hammock. Udara yang sejuk dan lingkungan bersih

disebut-sebut sebagai penawar terbaik usai beraktivitas. Pepohonan disini terdiri atas beragam jenis, asal, dan kegunaannya. Pengunjung dapat menjumpai informasi tentang detail tanaman pada papan yang menempel. Puas jogging atau bersantai, pengunjung dapat melanjutkan kegiatan dengan bermain sepak bola. Tersedia lapangan kecil di tengah hutan untuk menunjang kegiatan ini.

### **Area Danau**

Taman Bumi Serpong Damai 2 menjadi referensi spot berburu foto terbaik selanjutnya. Terdapat beragam sarana di sekeliling danau ini, mulai dari gazebo, amfieter, skatepark, dan pendopo. Spot Danau memiliki pojok tanaman hias yang jadi tempat favorit wisatawan. Tanaman hias ini berbentuk vertikal dengan pemandangan langsung mengarah ke danau. Di sebelahnya, berdiri playground dimana orang tua dapat mengajak anak-anak bermain dengan aman. Udara sekitar yang sejuk dan segar dijamin membuat liburan keluarga disini menyenangkan. Tidak jauh dari gazebo tersebut, ada foodcourt dengan beragam kudapan yang nikmat.

### **Tips Berkunjung**

Jangan lupa untuk memeriksa beberapa poin berikut sebelum berlibur.

- Pastikan kondisi fisik dalam keadaan fit, daya tahan tubuh yang lemah akan membuat liburan terhambat.
- Siapkan Anggaran dalam jumlah yang cukup untuk menutup kebutuhan konsumsi dan transportasi. Jika menginap, maka keperluan akomodasi penginapan wajib Anda cantumkan.
- Datanglah bersama rombongan keluarga atau teman agar liburan makin ceria.
- Gunakan kamera dengan resolusi terbaik agar hasil jepretan memuaskan. Ini wajib apabila Anda berencana untuk berburu spot foto terbaik di BSD Tangerang.
- Jangalah kebersihan lingkungan sekitar dan hindari melakukan perusakan fasilitas.

## 2.4 Kerangka Konsep

Pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat membuat perkotaan memiliki daya tarik tersendiri yang secara tidak langsung mengakibatkan urbanisasi. Perkotaan menawarkan kesempatan yang begitu besar bagi setiap orang yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Pertumbuhan perkotaan serta diikuti dengan meningkatnya urbanisasi berdampak pada tata kelola dan struktur perkotaan. Permasalahan yang terjadi di perkotaan akan timbul seperti banjir, pemukiman kumuh, terjadi kesenjangan sosial, dan berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan (Yuslimu & Setiawan, 2021).

Salah satu pembangunan di suatu daerah adalah Ruang Terbuka Hijau yang identik dengan area terbuka yang memiliki luas serta panjang tertentu dengan berbagai macam pepohonan dan taman yang biasa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di ruang terbuka seperti olahraga, berwisata, atau menyalurkan hobi (Amin, 2018). Salah satu jenis RTH menurut Permendagri No.1/2007 adalah Taman Kota.

Taman Kota merupakan RTH yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mashuri dalam (Salshabila & Sukmawati, 2021) yang mengatakan bahwa taman kota dan hutan kota berperan penting bagi lingkungan hidup masyarakat. Taman kota merupakan salah satu visual yang sangat dibutuhkan masyarakat yang tinggal dipertanian sebagai penyejuk mata. Selain itu taman kota juga memiliki fungsi penting seperti paru-paru kota, pengendali iklim mikro, dan sebagainya sehingga memberi kenyamanan bagi masyarakat yang mengunjunginya.

Ruang terbuka hijau *existing* kota Tangerang Selatan terdapat sebesar 39,968 Km<sup>2</sup> atau sebesar 3.996,85 Ha. Sedangkan luas kota Tangerang Selatan sebesar 147,2 Km<sup>2</sup>. Luas ruang terbuka hijau *existing* bekisar pada angka 27,15% (Salshabila & Sukmawati, 2021). Berdasarkan data tersebut, ruang terbuka hijau pada kota Tangerang Selatan masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Faktor penyebab kurangnya lahan terbuka hijau di kota Tangerang yaitu faktor anggaran dana. Pemerintah kota Tangerang membutuhkan biaya

sebesar 16 triliun untuk luas lahan sebesar 1.600 Ha. Selain itu, minimnya ruang terbuka hijau di kota Tangerang akibat terjadinya alih fungsi lahan menjadi *integrated business, commercial & residential development*. Lahan hijau berubah menjadi lahan yang dibangun yang dapat mengakibatkan kerugian. Faktor lainnya berupa pertumbuhan penduduk yang meningkat sehingga pemerintah membuka lahan sebagai tempat pemukiman (Amin, 2018).

Pengelolaan taman kota 2 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pihak lain yakni pihak swasta dan masyarakat (Daniati, 2019). Berjalannya pengelolaan taman kota 2 karena adanya keterlibatan pihak lain dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan taman. Adanya keterlibatan masyarakat, komunitas, dan organisasi dapat meningkatkan interaksi sosial sehingga dapat membangun hubungan baik antara pengelola dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan taman (Asti et al., 2021).

Menurut Arnstein (1969) partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau seperti Taman Kota 2 Tangerang Selatan agar mencapai target dan tujuan tertentu diperlukan kerjasama berbagai pihak. Beberapa pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan Taman ini adalah pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Arnstein (1969) menyebutkan bahwa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan memiliki kekuatan dan kekuasaan. Oleh karena itu sangat penting untuk melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan terbesar di negara ini.

Tabel 2.3 Kerangka Berpikir

